

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- Abdurrahman dan Riduan Syarani. *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Alumni, 1978.
- Achmad Ali. *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*. Cet. Kedua. Jakarta: PT. Gunung Agung, 2002.
- Agustin Sukses Dakhi. *Perkawinan Beda Agama: Suatu Tinjauan Sosiologi*. Yogyakarta: Deepublish, 2012.
- Ashofa Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Asmin. *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*. Jakarta: PT Dian Rakyat, 1986.
- Budianto, M. A. *Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya*. Disertasi Doktor, IAIN Ponorogo, 2021.
- Haikal, Muhammad. *Analisis Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Tentang Tidak Dapat Diterima Permohonan Kasasi Jaksa Penuntut Umum Dalam Perkara Pidana Pemalsuan Surat (Studi Putusan No.1785/K/Pid/2011)*. Universitas Lampung, 2014.
- Harahap, Nursapiah. *Penelitian Kualitatif*. Sumatera Utara: Wal Ashri Publishing, 2020.
- Hardjowahono, B. S. *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Harjono. *Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia*. Universitas Airlangga, Surabaya, 6 Juni 2003.
- Lim, Evelyn Christhalia. *Analisis Putusan Hakim Mengenai Perkawinan Beda Agama di Indonesia Menurut Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan dan Hak Asasi Manusia (Studi Putusan: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 Atas Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)*. Universitas Diponegoro, 2024.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2006.

- Mertokusumo, Soedikno. *Penemuan Hukum, Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2001.
- Nur Ausath, Ofah Musyarofah. *Nikah Siri Dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Sosial (Studi Di Desa Tulungagung Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu)*. Cirebon: Kementerian Agama Republik Indonesia Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, 2020.
- O. S. Eoh. *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001.
- Posner, Richard A. *How Judges Think*. Cambridge: Harvard University Press, 2008.
- Puji Supriyono. *Keamanan Peralatan Radiasi Pengion Dikaitkan dengan Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kesehatan di Bidang Radiologi Diagnostik*. Semarang: Repository Unika, 2010.
- Soekanto, Soerjono, dan Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: UI Press, 1990.
- Soekanto, Soerjono, dan Purbacaraka, Purnadi. *Perihal Kaidah Hukum*. Bandung: Alumni, 1979.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Thalib, A. R., dan M. Sh. *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2018.
- Yunu, Jarwo. *Aspek Perkawinan Beda Agama di Indonesia*. Jakarta: CV Insani, 2005.

### **Jurnal Ilmiah**

- Amin, M. N. “Perkawinan Campuran Dalam Kajian Perkembangan Hukum: Antara Perkawinan Beda Agama Dan Perkawinan Beda Kewarganegaraan di Indonesia”. *Al-Ahwal* 9, no. 2 (Desember 2016): 211–220. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2016.09206>.
- Amri, Aulil. “Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam”. *Media Syari’ah* 22, no. 1 (Mei 2020): 48–64. <https://doi.org/10.22373/jms.v22i1.6719>.
- Bola, M., Librayanto, R., dan Arisaputra, M. I. “Korelasi Putusan Hakim Tingkat Pertama, Tingkat Banding, dan Tingkat Kasasi (Suatu Studi tentang Aliran Pemikiran Hukum)”. *Hasanuddin Law Review* 1, no. 1 (April 2015): 27–46. <http://dx.doi.org/10.20956/halrev.v1i1.38>.

- Budiyono. "Hubungan Negara dan Agama Dalam Negara Pancasila". *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 3 (Juli-September 2014): 410–423. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no3.305>.
- Cantonia, Sindy, dan Majid, Ilyas Abdul. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Beda Agama di Indonesia dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Hak Asasi Manusia". *Hukum Lex Generalis* 2, no. 6 (Juni 6, 2021): 510–527. <https://doi.org/10.56370/jhlhg.v2i6.122>.
- Daeng, Y., & Ariga, F. "Larangan Pernikahan Beda Agama Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia." *Journal Equitable* 87, 2(2): 70–87.
- Dahwal, Sirman. "Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama (Studi Berbagai Kasus di Indonesia Periode 1986-2010)". *Jurnal Bengkoelen Justice* 2, no. 2 (2012): 471–487. <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/160932>.
- Hambali, A. R., Ramadani, R., & Djanggih, H. "Politik Hukum PERMA Nomor 1 Tahun 2020 dalam Mewujudkan Keadilan dan Kepastian Hukum terhadap Pemidanaan Pelaku Korupsi". *Jurnal Wawasan Yuridika* 5, no. 2 (2021): 200–223. <https://doi.org/10.25072/jwy.v5i2.511>.
- Islamiyati. "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU/XII/2014 Kaitannya dengan Nikah Beda Agama Menurut Hukum Islam di Indonesia". *Jurnal Al-Ahkam* 27, no. 2 (Oktober 2017): 157–178. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2017.27.2.1572>.
- Muthalib, Abdul. "Murtad (Pindah Agama) dalam Kajian Hukum Islam". *Jurnal Hikmah* 17, no. 2 (Juli-Desember 2020): 74–85. <https://doi.org/10.53802/hikmah.v17i2.81>.
- Pramesty, V. R. dan Mardijono, H. A. "Pemenuhan Prosedur Perkawinan Beda Agama di Luar Negeri oleh Warga Negara Indonesia". *Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH)* 6, no. 1 (2023): 275. <https://doi.org/10.31328/ciastech.v6i1.5270>.
- Prasetyo, Agung Basuki. "Akibat Hukum Perkawinan yang Tidak Dicatatkan Secara Administratif pada Masyarakat Adat". *Administrative Law & Governance Journal* 2, no.1 (Maret 2020): 23–34. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/view/7975/4142>.
- Ridwan, Ahmad N., Pujiyono, P., & Saptanti, N. "Controversy Over The Rejection Of Interfaith Marriage Approval: Between The Circular Of The Supreme Court And The Population Administration Law In Indonesia." *International Journal of Educational Research & Social Sciences* 4, no. 6 (2023): 1036–1044. <https://doi.org/10.51601/ijersc.v4i6.753>.
- Rosadi, E. "Putusan Hakim yang Berkeadilan". *Badamai Law Journal* 1, no. 2 (April 2016): 381–400. <https://doi.org/10.32801/damai.v1i2.1850>.

- Sakagama, I., dan Herisasono, A. “Analisis Yuridis Hak Waris Istri (Kedua) dari Perkawinan yang Menggunakan Status Asal-Usul Perkawinan Palsu.” *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 8, no. 6 (2023): 4307–4317. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i6.12468>.
- Santoso. “Hakikat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam, dan Hukum Adat”. *Jurnal Yudisia* 7, no. 2 (2016): 409–429. <https://doi.org/10.30984/as.v2i1.217>.
- Sinurat, E. R. A. “Eksistensi Perjanjian Pranikah Dalam Pembagian Harta Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974”. *Lex Privatum* 5, no. 7 (Desember 12, 2017): 36–42.
- Sondak, Sandi Hesti, Taroreh, Rita N., dan Uhing, Yantje. “Faktor-Faktor Loyalitas Pegawai di Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara”. *Jurnal EMBA* 7, no. 1 (Januari 22, 2019): 671–680. <https://doi.org/10.35794/emba.v7i1.22478>.
- Syaputra, M. Y. A. “Kajian Yuridis Terhadap Penegasan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia dalam Perspektif Stufen Theorie”. *Jurnal Mercatoria* 9, no. 2 (2016): 95–103. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v9i2.433>.
- Usman, Rachmadi. “Makna Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia”. *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 3 (September 29, 2017): 255–274. <https://doi.org/10.54629/jli.v14i3.80>.
- Wahyuni, S. “Perkawinan Beda Agama di Indonesia dan Hak Asasi Manusia.” *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia* 1, no. 1 (2011): 136–153. <https://doi.org/10.14421/inright.v1i1.1215>.
- Wallenstein, P. “The Right to Marry: Loving v. Virginia.” *OAH Magazine of History* 9, no. 2 (1995): 37–41. <http://www.jstor.org/stable/25163014>.
- Wingiosoebroto, Soetandyo. “Penelitian Hukum: Sebuah Tipologi”. *Majalah Masyarakat Indonesia* 1, no. 2 (1974): 1–14.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan.

Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 April 1989.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Keputusan MUI Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005.

*Universal Declaration of Human Rights (UDHR).*

*International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).*

*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR).*

*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW).*

*European Convention on Human Rights (ECHR).*

*Dutch Civil Law. Book 1 Law of Persons and Family Law.*

*Fourteenth Amendment to the United States Constitution.*

### **Putusan Hakim**

*Loving v. Virginia*, 388 U.S. 1 (1967).  
<https://supreme.justia.com/cases/federal/us/388/1/>.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986 Tahun 1986

Putusan Mahkamah Agung Nomor 86/Pdt.P/2020/PN.Mkd Tahun 2020

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 Atas Pengujian UUP terhadap UUD NRI 1945

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 155/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 359/Pdt.P/2023/PN Jkt.Tim.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr.

Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 141/Pdt.P/2023/PN Yyk.

Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 174/Pdt.P/2023/PN Yyk.

Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 180/Pdt.P/2023/PN Yyk.

### **Media**

Affan, Heyder, dan Franciska, Christine. “Ahmad Nurcholish dan Pernikahan Beda Agama”. *BBC News Indonesia*, 1 Juli 2015.

Djajakartika, Rudianto. “Pernikahan Beda Agama”. *GKIPi*, Oktober 13, 2018.

Mulyana, Kurniawan Eka. “Tanggapi Desakan Mundur dari Jabatan, Ketua MK: Apakah Saya Harus Berkorban Melepaskan Hak Asasi?” *Kompas*, Maret 28, 2022.

Riana, Friski. “Pernikahan Pasangan Beda Agama Merupakan Konsekuensi dari Indonesia yang Merupakan Negara Majemuk”. *Tempo*, Agustus 6, 2023.

### **Wawancara**

Purbantoro. Wawancara. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, (Semarang: April 21, 2025).

### **Kitab Suci**

*Alkitab dalam Bahasa Indonesia Masa Kini*, 2 Korintus 6:14.

*Alkitab dalam Bahasa Indonesia Masa Kini*, Efesus 5:31.

*Q.S. Al-Baqarah*: 221.

*Q.S. Al-Maidah*: 5.

*Q.S. Al-Mumtahanah*: 10.

*Q.S. Ali Imran*: 14.